

PENGARUH BIAYA SOSIAL DAN INDIVIDU TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DAN MUTU AKADEMIK SMA NEGERI DI DAERAH PERKOTAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Oleh: Efni Cerya dan Agus Irianto

Abstract

This study aimed to measure the influence of social and private cost to learning implementation cost and academic quality of States High School in urban area of West Sumatera province. The population of this study are state high schools in urban areas of West Sumatera. Samples were purposive sampling reduced it to be 32 schools with criteria that had the national exams score for one year and financing by social and individual. The research proved that private and learning implementation cost influence on the academic quality with 0,64 determinant, but social costs are not. This study suggests to use the private cost as one input to improve the quality of academic.

Keyword: *social cost, private cost, learning implementation cost, academic quality*

PENDAHULUAN

Peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran pembangunan pendidikan secara nasional dan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia secara menyeluruh. Telah menjadi keyakinan semua bangsa di dunia bahwa pendidikan merupakan investasi yang bernilai tinggi untuk kemajuan sebuah bangsa, oleh sebab jika sebuah pemerintahan tidak memiliki komitmen yang kuat dalam pembangunan sektor pendidikan secara serius dan berkelanjutan, dapat diprediksikan bahwa pemerintahan negara tersebut dalam jangka panjang justru akan menjebak mayoritas rakyatnya memasuki dunia keterbelakangan dalam berbagai aspek kehidupan.

Sowiyah (2010:24) menyatakan bahwa “mutu dalam konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu. Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan (*student achivement*) dapat berupa hasil tes kemampuan akademis ataupun bersifat *intangible* berupa perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Sejalan dengan itu, Suhardan (2012: 75), menyatakan bahwa “mutu satuan pendidikan atau mutu akademik dapat dilihat dari sudut

kuantitatif dan dari sudut kualitatif. Dari segi kuantitatif dapat dilihat dari sisi indeks prestasi hasil belajar, yudicium, jumlah lulusan, banyaknya siswa/mahasiswa diterima di perguruan tinggi lanjutan, atau yang diterima bekerja di instansi/perusahaan, banyaknya alumni menjadi pejabat dan sebagainya. Sedangkan mutu akademik secara kualitatif dilihat dari kemampuan akademis aplikatif dari siswa/mahasiswa tersebut”.

Mutu akademik baik secara kualitatif ataupun kuantitatif merupakan sebuah fungsi dari sejumlah faktor input, proses, dan output. Dengan kata lain, sebuah mutu akademik merupakan target khusus dari tujuan pendidikan berupa kualitas *output* dan *outcome* dari siswa selaku *stakeholder* utama pendidikan yang ditentukan oleh beberapa faktor yaitu kualitas input (jumlah guru, jumlah guru yang mengikuti pelatihan, dan jumlah buku teks yang tersedia), kualitas proses (jumlah waktu pembelajaran langsung dan tingkat pembelajaran aktif), dan kualitas kurikulum. Faktor-faktor inilah nantinya yang akan berkolaborasi dalam bentuk proses pembelajaran yang berkualitas.

Supriadi (2001) dan Irianto (2010:117) menyatakan bahwa proses pembelajaran yang berkualitas terjadi jika pengkoordinasian dan penyerasian serta perpaduan input sekolah dilakukan secara harmonis dan terpadu yang sangat bergantung dari tenaga pengajar, peralatan, dan sumber-sumber pembelajaran. Ketersediaan tenaga pengajar yang berkualitas, peralatan dan sumber-sumber pembelajaran itu sendiri tergantung kepada besaran pembiayaan atau dana yang dimiliki oleh entitas pendidikan untuk penyelenggaraan pembelajaran.

Biaya (*cost*) dalam pendidikan memiliki cakupan luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga (yang dapat dihargaikan dengan uang). Biaya merupakan elemen yang sangat penting walaupun bukan satu-satunya komponen yang paling penting. Bagaimanapun bagus rancangan kurikulum, matangnya perencanaan pendidikan, akan tetapi ketika sampai pada tahap operasional dan terbentur adanya keterbatasan biaya maka perencanaan yang bagus tersebut kurang memiliki makna yang berarti, bahkan mungkin program pendidikan yang direncanakan sulit terealisasi.

Di negara Indonesia, pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan yaitu penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang merupakan tanggungjawab jawab bersama antara 1) pemerintah, 2) pemerintah daerah yang digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan pemeliharaan serta dari daya dan jasa dan 3) masyarakat baik dalam arti khusus yaitu orang tua siswa atau dalam arti umum yaitu masyarakat yang peduli dengan pendidikan. Tanggung jawab dari pihak

siswa adalah berupa biaya pribadi peserta didik dan pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan.

Dalam konteks pembiayaan pendidikan, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan penyelenggaraan pembelajaran berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, perangkat pembelajaran, biaya transportasi, gaji guru, dan peningkatan mutu guru baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orangtua, maupun siswa sendiri disebut dengan biaya langsung (*direct cost*). Biaya langsung kemudian dipilah menjadi biaya sosial (*social cost*) berupa pembiayaan yang bersumber dari pemerintah dan masyarakat dan biaya individu (*private cost*) berupa pembiayaan yang bersumber dari pihak peserta didik.

Biaya sosial berupa dana dari APBN, APBD dan masyarakat didapatkan entitas pendidikan melalui anggaran yang diajukan kepada pemerintah melalui RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah). RKAS ini direalisasikan dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Bantuan Operasional Sekolah adalah program Pemerintah berupa pemberian dana langsung ke sekolah dimana besaran dana bantuan yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa masing-masing sekolah dan satuan biaya (*unit cost*) bantuan. Dana BOS digunakan untuk membantu sekolah memenuhi biaya operasional sekolah non personalia. Ketika dana BOS tidak mencukupi pembiayaan penyelenggaraan suatu entitas pendidikan maka terjadilah *sharing biaya* dengan pengguna jasa pendidikan (siswa) dalam bentuk biaya individu.

Suhardan (2012: 24) dan Irianto (2011:152) menyatakan bahwa biaya individu (*private cost*) merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan pihak

peserta didik atau segala biaya yang harus ditanggung dan dikeluarkan keluarga anak untuk keberhasilan belajar anaknya baik berupa pungutan dari sekolah ataupun berupa biaya hidup dan biaya penunjang studi. Nominal biaya individu yang dipungut oleh sekolah adalah hasil perhitungan dari selisih biaya langsung dengan biaya rutin langsung yang dibagi secara merata terhadap setiap siswa (Bastian, 2007:142). Dengan adanya PP No 47 Tahun 2008 pasal 9 dinyatakan bahwa “pemerintah menanggung sepenuhnya pembiayaan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) sebagai salah satu implikasi dari program wajib belajar 9 tahun”. Maka biaya individu berupa iuran yang dipungut oleh sekolah baru mulai dapat dilihat pada jenjang pendidikan menengah. Dengan adanya *sharing* pembiayaan pendidikan diharapkan penyelenggaraan pembelajaran akan lebih maksimal sehingga menghasilkan peningkatan mutu akademik secara nasional.

Dalam konteks analisis pembiayaan pendidikan berupa biaya sosial dan biaya individu terhadap biaya penyelenggaraan pembelajaran dan peningkatan mutu akademik tersebut, peneliti memilih daerah perkotaan provinsi Sumatera Barat sebagai daerah penelitian. Berdasarkan data Susenas 2012, daerah perkotaan provinsi Sumatera Barat memiliki komitmen yang tinggi dalam meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat dari profil pendidikan secara umum di daerah perkotaan provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa motivasi mengikuti pendidikan penduduk Sumatera Barat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan (berdasarkan APS). Dilihat dari ketersediaan sumberdaya sekolah berupa jumlah ruang kelas, provinsi Sumatera Barat menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi yaitu 65,64%. Rincian data survey Susenas 2012 menunjukkan bahwa rasio siswa dan guru sebesar 1: 9 dan rasio siswa dan kelas sebesar 1:25. Angka ini sudah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang ditetapkan oleh

pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan provinsi Sumatera Barat berkomitmen dalam meningkatkan pelayanan dan mutu pendidikan menengah provinsi Sumatera Barat.

Namun, jika dilihat dari sisi mutu akademik berdasarkan akreditasi sekolah, mutu pendidikan SMA di daerah perkotaan provinsi Sumatera Barat variatif sekali yaitu dari 97 SMA di provinsi Sumatera Barat terdapat 27 SMA terakreditasi A, 29 SMA terakreditasi B, 19 SMA terakreditasi C dan 22 SMA yang tidak terakreditasi (www.ban-sm.or.id). Kondisi yang lebih miris lagi jika melihat dari sudut pandang keberhasilan siswa dalam Ujian Nasional (UN) 2 tahun terakhir yang juga bervariasi dan mengalami penurunan. Jika ditelusuri perkembangan per SMA yang mengikuti UN, maka dapat dilihat bahwa variasi nilai antar sekolah sangat besar sekali. Sebagai contoh, hasil UN 2010/2011 menunjukkan peringkat kota Padang untuk UN adalah peringkat 6, padahal SMA Negeri 1 kota Padang pada saat itu menduduki nilai tertinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan mutu yang cukup besar antar sekolah.

Perkembangan mutu akademik berdasarkan kota untuk 2 tahun terakhir menunjukkan bahwa 6 dari 7 kota di Sumatera Barat pendidikan menengahnya mengalami penurunan berdasarkan hasil UN dengan rata-rata penurunan sebesar 0,38 (5,14%). Salah satu faktor yang membuat peningkatan mutu akademik agak lemah dan memiliki variasi yang besar adalah kualitas penyelenggaraan pembelajarannya yang masih rendah.

Hasil diskusi dengan kepala dinas pendidikan provinsi Sumatera Barat dan juga pengawas SMA di beberapa daerah perkotaan provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa penyelenggaraan pembelajaran masih belum memenuhi standar pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari 1) perangkat pembelajaran; masih terdapat guru yang belum mampu membuat RPP yang sesuai dengan standar proses, memilih dan

menggunakan metode dan media yang sesuai dengan kondisi siswa atau materi yang akan diajarkan, dan masih terdapat guru yang belum mampu menyusun alat evaluasi yang baik 2) peningkatan mutu tenaga pengajar; masih minimnya pelatihan atau pendidikan yang diikuti guru untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan guru.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa guru didapatkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas penyelenggaraan pembelajaran adalah 1) keterbatasan waktu yang dimiliki guru dalam mempersiapkan perangkat pembelajaran, karena guru lebih fokus kepada jumlah jam mengajar dibandingkan kualitas sebagai dampak sertifikasi guru yang mengharuskan mengajar sejumlah 24 jam pelajaran dalam seminggu, 2) ketersediaan fasilitas pembelajaran yang kurang memadai atau masih kurangnya sumber pembelajaran, 3) terbatasnya dana untuk mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi guru.

Dilihat dari sisi pembiayaan pendidikan, dengan adanya kebijakan otonomi daerah, pemerintah kota telah berusaha menerapkan PP No. 48 Tahun 2008 yaitu adanya *sharing* pembiayaan untuk penyelenggaraan pendidikan sehingga memunculkan biaya sosial dengan biaya individu.

Perkembangan biaya sosial dan biaya individu di daerah perkotaan provinsi Sumatera Barat 2 tahun terakhir malah menimbulkan kerancuan karena untuk kota yang mengalami kenaikan anggaran sosial malah mengalami kenaikan untuk SPP, sedangkan untuk kota yang mengalami penurunan anggaran malah free SPP. Padahal SPP merupakan hasil perhitungan total biaya penyelenggaraan pendidikan dikurangi *social cost* dan dibagi dengan jumlah siswa.

Berdasarkan uraian masalah di atas dapat dilihat bahwa mutu akademik jenjang pendidikan SMA di daerah perkotaan provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan dari tahun ke tahun dan terdapat

variasi mutu yang cukup besar antar Sekolah yang ada. Sedangkan, dari sisi pembiayaan pendidikan sebagai salah satu faktor penentu penyelenggaraan pembelajaran dan mutu akademik terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur besaran pengaruh biaya sosial dan biaya individu terhadap biaya penyelenggaraan pembelajaran dan mutu akademik pada jenjang pendidikan SMA di daerah perkotaan provinsi Sumatera Barat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausal yaitu untuk menganalisis hubungan antara satu variabel terhadap variabel lainnya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1) biaya sosial yang diukur dengan Anggaran penerimaan sekolah yang bersumber dari masyarakat secara langsung ataupun dari pemerintah untuk membiayai kegiatan operasional sekolah 2) biaya individu yang diukur dalam bentuk jumlah pungutan biaya dari sekolah terhadap siswa, 3) variabel mutu akademik sebagai variabel eksogen diukur dengan Nilai Ujian Nasional Siswa SMA Negeri, dan 4) variabel penyelenggaraan pembelajaran sebagai variabel intervening yang diukur dalam bentuk anggaran yang dialokasikan sekolah selama satu tahun ajaran pendidikan untuk: 1) perencanaan dan pengadaan perangkat dan sumber pembelajaran, seperti silabus, RPP, alat dan teknologi untuk media pembelajaran, dan buku referensi 2) Program peningkatan kompetensi guru, seperti keikutsertaan dalam pelatihan dan workshop. Data merupakan data sekunder kuantitatif dan kontinum berupa dokumentasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan hasil Ujian Nasional Tahun Ajaran 2012/2013. Data ini diperoleh dari kepala sekolah, kepala dinas pendidikan kota dan provinsi, serta kepala DPKD provinsi Sumatera Barat.

Penelitian ini dilaksanakan pada Sekolah Menengah Atas Negeri di daerah perkotaan provinsi Sumatera Barat dengan

populasi berjumlah 42 sekolah. Sampel diambil dengan menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria yaitu telah mengikuti Ujian Nasional pada tahun ajaran 2012/2013 dan memiliki *sharing* pembiayaan antara pihak sosial dan individu. Jumlah sampel sebanyak 32 sekolah. Metode analisis yang digunakan terdiri dari 1) analisis deskriptif untuk menggambarkan data per variabel, 2) analisis induktif berupa uji prasyarat (normalitas, heterokedastisitas dan multikolinieritas) dan analisis jalur, dan 3) uji hipotesis dengan uji t dan uji F.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan mengacu pada tujuan penelitian dan hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian yaitu melalui uji analisis dengan menggunakan *path analysis*. Secara simultan, hasil analisis menunjukkan pengaruh antar variabel bebas dengan variabel terikat adalah signifikan dengan sebesar 16,416 lebih besar dari sebesar 2.95 yang membuktikan bahwa semua variabel bebas (eksogen) mempengaruhi variabel konstruk (endogen) secara signifikan. Disamping itu juga dibuktikan dengan nilai signifikansi hitung 0,000 kecil dari tingkat signifikansi yang dipakai (5%) (tabel 4.8). Kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar R square (R^2) 0,638 atau dengan kontribusi sebesar 63,8% sedangkan sisanya 36,2% disumbangkan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Hal ini berarti pembiayaan pendidikan baik yang bersumber dari masyarakat ataupun individu yang dikelola dengan baik untuk penyelenggaraan pembelajaran akan mampu meningkatkan mutu akademik pendidikan SMA Negeri di daerah perkotaan provinsi Sumatera Barat. Pernyataan ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh standar proses pendidikan yaitu penyelenggaraan kegiatan pembelajaran oleh sekolah dengan menggunakan standar-standar yang telah ditentukan sebagai patokan, maka tujuan pembelajaran akan dapat dicapai dengan hasil yang baik dan

memuaskan. (Mulyasa, 2004c:7 dan PP No. 19/2005).

Pengaruh biaya sosial terhadap biaya individu menunjukkan hasil yang lemah dan tidak signifikan, dengan kontribusi (R^2) variabel adalah sebesar 0,029 (2,9%) yang berarti sumbangan biaya sosial terhadap perubahan biaya individu relatif kecil. Dengan kata lain, bahwa besaran biaya sosial yang bersumber dari masyarakat baik secara langsung ataupun melalui pemerintah tidak berpengaruh pada jumlah biaya individu yang dibebankan pada siswa SMA Negeri di daerah perkotaan provinsi Sumatera Barat. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah penerimaan sekolah yang bersumber dari pemerintah tidak menjadi patokan dalam menentukan biaya individu.

Hasil diskusi dengan beberapa kepala sekolah menyatakan bahwa jumlah biaya individu ditentukan melalui musyawarah bersama komite sekolah (orang tua siswa) dengan pihak sekolah dan merupakan kesepakatan bersama setelah setelah rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun ajaran. Selanjutnya, hasil diskusi dengan kepala dinas pendidikan menyatakan bahwa faktor lokasi dan favorit atau tidaknya sekolah menjadi pemicu dalam penentuan jumlah biaya individu siswa. Trend yang ada dalam pendidikan saat ini adalah sekolah favorit atau memiliki popularitas yang tinggi di tengah masyarakat dan sekolah yang dekat dengan pusat kota cenderung menetapkan biaya individu yang lebih tinggi dan sekolah tersebut memiliki posisi yang cukup kuat dalam menawarkan opsi biaya kepada pihak komite sekolah. Kesepakatan komite sekolah atas biaya individu ini merupakan wujud keinginan pihak siswa agar anaknya mendapatkan pendidikan yang lebih berkualitas. Hal ini sejalan dengan pendapat Suhardan dkk (2011:4) dan Elfindri (2010) yaitu besar kecilnya biaya yang menjadi beban orang tua siswa atas pendidikan tergantung pada pelayanan dan kualitas pendidikan yang mampu diberikan oleh

sekolah, sehingga pendidikan menjadi barang ekonomi.

Untuk pengaruh antara biaya sosial dan individu menunjukkan pengaruh yang besar dan signifikan secara statistik terhadap Z (Biaya penyelenggaraan pembelajaran) sedangkan kontribusinya (R^2) sebesar 53,9% atau 54%. Hal ini berarti bahwa peningkatan biaya sosial dan biaya individu akan mampu meningkatkan alokasi anggaran untuk membiayai penyelenggaraan pembelajaran. Hal ini mengindikasikan bahwa biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (*instrumental input*) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pembelajaran. Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pembelajaran baik kuantitatif maupun kualitatif biaya pendidikan memiliki peranan yang menentukan. Dengan adanya biaya pendidikan yang cukup maka sekolah memiliki kesempatan untuk menyelenggarakan pembelajaran berkualitas dengan perencanaan pembelajaran yang lengkap dan sesuai dengan tuntutan kurikulum, sumber ajar siswa yang cukup dan melakukan kegiatan untuk meningkatkan kompetensi guru.

Penelitian ini menunjukkan rata-rata biaya penyelenggaraan pembelajaran pendidikan SMA Negeri di daerah perkotaan provinsi Sumatera Barat memiliki persentase 28% dari seluruh total pembiayaan. Persentase ini cukup kecil jika dibandingkan dengan jenis biaya yang lainnya seperti biaya untuk gaji guru/pegawai, biaya pembangunan fisik, dan biaya pemeliharaan. Padahal menurut Fattah (2000:56), alokasi biaya yang harusnya diprioritaskan adalah biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar yaitu kemampuan guru, sarana kelas, dan buku-buku pelajaran. Namun, jumlah ini sudah lebih besar jika dibandingkan dengan temuan Supriadi (2001:217) yaitu alokasi biaya pendidikan sangat dominan untuk honorarium guru/pegawai yaitu 74-78% sedangkan untuk

penyelenggaraan pembelajaran sekitar 12-26%.

Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah penerimaan yang diterima sekolah dalam satu tahun ajaran akan menjadi faktor penting bagi sekolah dalam menetapkan porsi biaya bagi penyelenggaraan pembelajaran. Namun, tentu saja persentase biaya pada setiap sekolah berbeda-beda sesuai dengan visi dan misi sekolah serta skala prioritas sekolah. Untuk itu dibutuhkan kemampuan manajemen keuangan dan strategi yang bagus dari pihak sekolah dalam mengalokasikan dana yang ada sehingga bisa lebih efisien dan mampu menunjang untuk pencapaian pembelajaran yang berkualitas untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah tersebut.(Fattah,2000:26)

Untuk pengaruh antara biaya sosial, biaya individu dan biaya penyelenggaraan pembelajaran menunjukkan pengaruh yang besar dan signifikan secara statistik terhadap Mutu Akademik dengan kontribusinya (R^2) sebesar 63,8% atau 64%. Hal ini berarti bahwa peningkatan biaya sosial, biaya individu dan biaya penyelenggaraan secara bersama akan mampu meningkatkan mutu akademik pendidikan SMA Negeri di daerah perkotaan provinsi Sumatera Barat. Dalam upaya menyelenggarakan dan meningkatkan sistem pendidikan yang berkualitas, biaya merupakan komponen yang sangat penting, dan dapat dikatakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa adanya dukungan biaya. Dilihat dari sudut pandang ekonomi, tidak ada kegiatan pendidikan tanpa biaya. Biaya itu diperlukan untuk memenuhi beragam kebutuhan yang berkenaan dengan kelangsungan proses pendidikan. Hal ini sejalan pernyataan Suhardan (2012:69) bahwa peningkatan mutu selalu diikuti oleh ketersediaan biaya untuk mencapainya, baik yang bersumber dari sosial ataupun individu selaku *beneficiaries*.

Namun, bila dilihat secara parsial masing-masing variabel ini memberikan

kontribusi yang berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya dibahas sebagai berikut:

Pengaruh biaya sosial terhadap mutu akademik pendidikan SMAN di daerah perkotaan provinsi Sumatera Barat

Hasil uji statistik secara parsial menunjukkan biaya sosial memiliki pengaruh yang lemah dan tidak signifikan terhadap mutu akademik, dengan koefisien jalur - 0,045. Kontribusi ini dikategorikan kecil sehingga pengaruh variabel ini dihilangkan (*trimming*) dalam model yang dikemukakan, namun pembahasan terhadap variabel tetap dilakukan.

Pengaruh yang tidak signifikan ini menunjukkan bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak akan tercapai jika hanya mengandalkan biaya dari sosial. Hal ini disebabkan oleh beberapa kondisi yaitu 1) sebagian besar biaya sosial SMA negeri di daerah perkotaan provinsi Sumatera Barat masih bersumber dari anggaran pemerintah saja, 2) proporsi struktur anggaran yang bersumber dari pemerintah sebagian besar diperuntukkan untuk membayar gaji guru dan pegawai yaitu sekitar 74%-78% dari total RKAS, hal ini menyebabkan persentase anggaran untuk non gaji semakin kecil sehingga seluruh pembiayaan tidak *tercover*. 3) peningkatan jumlah biaya sosial pada SMA Negeri terjadi lebih dikarenakan adanya peningkatan pada gaji guru. Hal ini mendukung pernyataan Supriadi (2010: 218) yang mengatakan bahwa “sesungguhnya tidak banyak yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan sekolah bila hanya menggantungkan diri pada dana yang bersumber dari subsidi pemerintah”. Jika sarana dan fasilitas belajar yang disediakan oleh pemerintah dibantu oleh masyarakat terpenuhi sesuai kebutuhan untuk digunakan para peserta didik, dengan penyediaan tenaga pengajar yang memenuhi kualifikasi dan penyediaan fasilitas belajar yang demikian baik, maka peserta didik akan mampu

menyerap model pengajaran yang disampaikan oleh para gurunya sebagai pendidik dan pengajar yang profesional.

Pengaruh biaya individu terhadap mutu akademik pendidikan SMAN di daerah perkotaan provinsi Sumatera Barat

Hasil uji statistik secara parsial menunjukkan biaya individu memiliki pengaruh yang kuat dan signifikan terhadap mutu akademik, dengan koefisien jalur 0,602. Kontribusi ini dapat dikategorikan besar dan dapat dimaknai bahwa peningkatan biaya individu akan mampu meningkatkan mutu akademik pendidikan SMA Negeri di daerah perkotaan provinsi Sumatera Barat.

Pengaruh biaya individu terhadap mutu akademik yang signifikan ini menunjukkan bahwa pihak peserta didik sebagai konsumen pendidikan dan juga sebagai input pendidikan juga harus bertanggungjawab dalam menyukseskan tujuan pendidikan. Partisipasi orang tua siswa dikelola melalui dewan komite sekolah. Melalui komite sekolah pihak orang tua siswa juga ikut dalam memberikan sumbangan pendidikan, masukan, pertimbangan (*advisory agency*), dan rekomendasi pada satuan pendidikan dengan prinsip mendorong peningkatan mutu akademik dan mutu layanan belajar di mana komite sekolah itu berada.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan untuk menjawab rumusan masalah, kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian adalah 1) biaya sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya individu pendidikan SMA Negeri di daerah perkotaan provinsi Sumatera Barat. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah penerimaan sekolah yang bersumber dari sosial/pemerintah tidak menjadi patokan dalam menentukan biaya individu. 2) biaya sosial dan biaya individu berpengaruh signifikan terhadap biaya penyelenggaraan

pembelajaran. Hal ini mengindikasikan bahwa biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (*instrumental input*) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pembelajaran. Dengan demikian perubahan biaya penyelenggaraan pembelajaran SMA Negeri di daerah perkotaan provinsi Sumatera Barat disumbangkan dan dijelaskan oleh perubahan biaya sosial dan biaya individu, sedangkan untuk persentasenya tergantung pada visi dan misi sekolah serta skala prioritas di sekolah tersebut, 3) biaya sosial, individu dan penyelenggaraan pembelajaran berpengaruh signifikan pada mutu akademik pendidikan SMA Negeri di daerah perkotaan provinsi Sumatera Barat dengan kontribusi sebesar 64%

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka akhirnya dikemukakan beberapa saran sebagai berikut: 1) Kepala sekolah selaku menejer dan pengelola sekolah disarankan agar mampu menyusun sebuah perencanaan biaya yang efektif dan efisien untuk dapat meningkatkan kualitas sumber pembelajaran, kualitas guru, sarana dan prasarana pendidikan untuk mewujudkan peningkatan mutu akademik dan tujuan pendidikan, 2) Sekolah harus menjalin kerjasama dengan masyarakat dalam memberikan dukungan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas sehingga peningkatan mutu akademik bisa tercapai.

Daftar Pustaka

Akpotu, N. E. 2008. Social Cost Analysis of Secondary Education in South West Nigeria (1996-2001). *Journal Social Science* , 27-33.

Bastian, I. 2007. *Akuntansi Pendidikan*. Jakarta: Erlangga.

Elfindri. 2010. *Pendidikan Sebagai Barang Ekonomi*. Bandung: Lubuk Agung

Fattah, N . 2004. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya.

Hallak, J. 1985. *Analisis Biaya dan Pengeluaran untuk Pendidikan*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara

Irianto, Agus. 2011. *Pendidikan Sebagai Investasi Dalam Pembangunan Suatu Bangsa*. Jakarta: Kencana.

Mc Ewan, P. J. 1999. Private Costs and The Rate Of Return to Primary Education. *Applied Economics Letters* , 759-760.

Mulyasa. 2004. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Rosdakarya.

Onsomu, Eldah N et all. 2007. Financing Secondary Education In Kenya: Cost Reduction and Financing Option. *Education Policy Analysis Archives* , 24.

Ornsstein, L. a. 2000. *Educational Administration (Concepts and Practices)*. London: Thomson Learning Berkshire House.

Riduwan dan Kuncoro. 2007. *Cara Menggunakan dan Memaknai Analisis Jalur (Path Analysis)*. Bandung: Alfabeta.

Sowiyah. 2010. *Pengembangan Kompetensi Guru SD*. Lampung: Lemlit UNILA.

Suwardan, D., Riduwan, & Enas. 2012. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Supriadi, Dedi. 2010. *Satuan Biaya Pendidikan; Dasar dan Menengah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.